



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARDI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**
3. NHK : **439373**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **932.000.000**

1. Tanah Seluas 3019 m2 di KAB / KOTA REMBANG, WARISAN Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 3446 m2 di KAB / KOTA REMBANG, WARISAN Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/48 m2 di KAB / KOTA REMBANG, WARISAN Rp. 75.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/148 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 172 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 51.000.000
6. Tanah Seluas 177 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 53.000.000
7. Tanah Seluas 178 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 53.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **273.000.000**

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **58.900.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	771.940.388
F. HARTA LAINNYA	Rp.	250.000.000
Sub Total	Rp.	2.285.840.388
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.285.840.388

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.